

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2023
KECAMATAN BATUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN BATUR**

Jl.Raya Batur no 47

BATUR-53456

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 adalah merupakan kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan LKJIP juga dalam rangka penyelenggaraan *good governance* serta memenuhi aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan bebas KKN, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh Wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan kondisi, potensi, perkembangan dan permasalahan serta tatanan masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan didasari dengan keinginan luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Batur Tahun 2024 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dalam angka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya.

LKJIP ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Banjarnegara, 29 Pebruari 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Singkat.....	1
B. Struktur Organisasi	4
C. Aspek Strategis Yang Berpengaruh	6
D. Issu Strategis	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Perencanaan Strategis Organisasi	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	16
BAB IV : PENUTUP	23
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	
2. Pengukuran Kinerja	

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik di lingkungan Kecamatan Batur, kami buat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Batur Tahun 2024.

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan kerja Kecamatan Batur, menggunakan Perencanaan Strategis (RENSTRA) 2023-2026 Kecamatan Batur sebagai acuan dengan harapan dapat selaras dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, karena Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan Pengukuran Kinerja merupakan rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja yang sangat penting.

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BATUR

Kecamatan Batur terletak pada ketinggian antara 1663-2093 m diatas permukaan air laut. Keadaan bentuk tanah sebagian besar merupakan dataran tinggi yang bergelombang (berbukit-bukit) serta mempunyai jenis tanah Andosol. Produktifitas tanah sedang hingga tinggi sehingga kondisi yang demikian menjadikan Kecamatan Batur mempunyai lahan pertanian yang subur untuk tanaman hortikultura jenis sayuran.

Kecamatan Batur memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pejawaran
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wanayasa

Luas wilayah Kecamatan Batur adalah 4.717,100 Ha , terdiri dari :

Tanah Sawah	: -
Tanah Kering	: 4.717,100 Ha dengan rincian :
Tanah Pekarangan/Bangunan	: 845,787 Ha
Tanah Tegalan/Kebun	: 2.644,420 Ha
Tanah Hutan Negara	: 1.062,300 Ha
Kolam	: 1,500 Ha
Perkebunan	: 34,850 Ha
Lain-lain (sungai,jalan,kuburan dll)	: 128,243 Ha.

Secara administrasi Kecmatan Batur terdiri dari 8 (delpan) desa, yaitu:

1. Desa Batur
2. Desa Sumberejo
3. Desa Pasurenan
4. Desa Pekasiran
5. Desa Kepakisan
6. Desa Bakal
7. Desa Karangtengah

8. Desa Diengkulon.

Guna melayani masyarakat, maka di Kecamatan Batur terdapat Lembaga/Instansi Pemerintahan Tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Instansi

- a. Vertikal : KUA, Pendaiss, , KRPH Perhutani, dan Pengamat Gunung Api Dieng
- b. Instansi Otonomi : - UPTD Dindikpora
- UPTD Puskesmas 1 & 2
- UPTB KBPP
- UPTD Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng
- Penyuluh Pertanian Lapangan
- Penyuluh Kehutanan Lapangan
- UPTD Pasar Batur
- SMAN1, SMPN1, SMPN2. MTsM
- c. Polsek : Polsek Batur dan Polsek Dieng
- d. Koramil
- e. Lembaga Perbankan : - BRI Unit Batur
- BRI Unit Dieng
- Bank Surya Yuda Cabang Batur
- Bank Surya Yudha Cabang Dieng
- BPR BKK Banjarnegara Cabang Batur.
- BMT AL Huda
- BMT TAMZIZ..

Personil

Bidang kepegawaian Kantor Kecamatan Batur memiliki 19 Pegawai 1 PTT dan 3 THL dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Kualifikasi Pendidikan	
	SD	0
	SMP	0
	SMA	13
	DIPLOMA 1,2,3	1
	S.1	5
	S.2	0
	Jumlah	19
2.	Golongan	
	THL	3
	PTT	1
	Golongan I	0
	Golongan II	6
	Golongan III	7

	Golongan IV	2
	Jumlah	19
3.	Pejabat Struktural	8
4.	Pejabat Fungsional	-

Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Batur Periode 31 Desember 2023

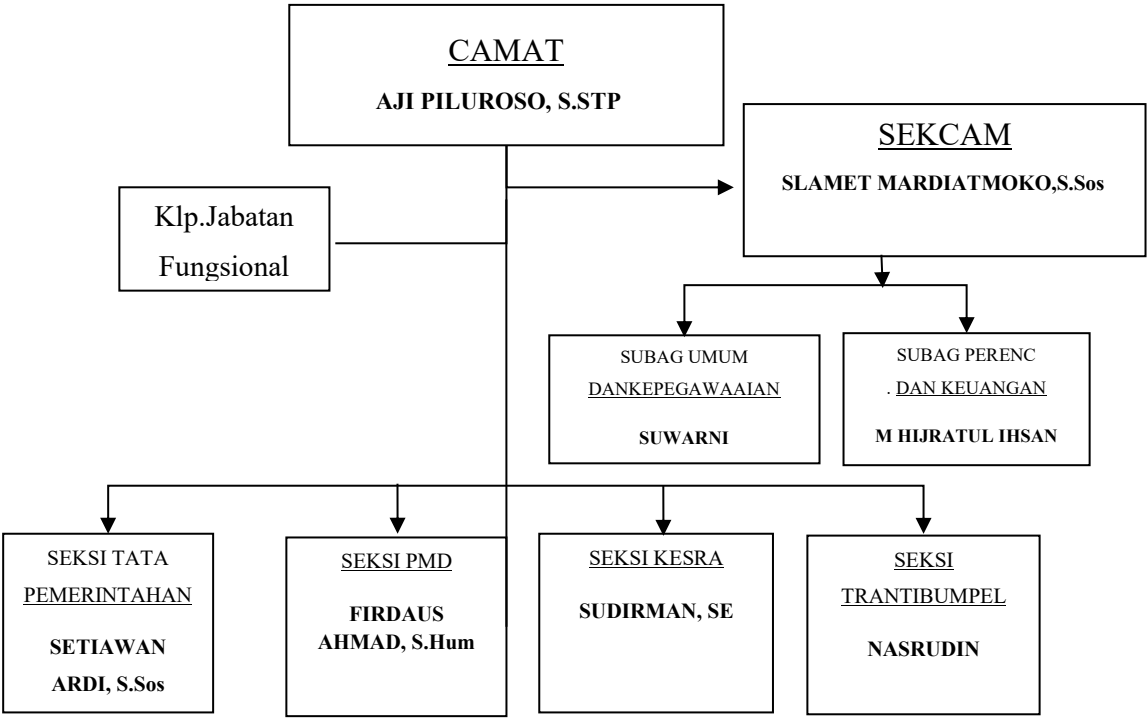
NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	AJI PILUROSO, S.STP NIP. 19820415 200112 1 003	Camat	S-1
2	SLAMET MARDIATMOKO, S.Sos NIP. 19671125 199103 1 006	Sekretaris Kecamatan	S-1
3	NASRUDIN NIP19690406 198903 1 005	Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan	SLTA
4	FIRDAUS AHMAD, S.Hum NIP.19760821 200901 1 004	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	S-1
5	SUDIRMAN, SE NIP. 19770107 200701 1 005	Kasi Kesejahteraan Rakyat	S-1
6	SETIAWAN ARDI NUGROHO, S.Sos NIP.19750602 200501 1 004	Kasi Tata Pemerintahan	S-1
7	M HIJRATUL IHSAN NIP.19800820 200501 1 008	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	D-3
8	SUWARNI NIP.19670417 1996032003	Kasubag Umum dan Kepegawaian	SLTA
9	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT NIP.19740924 200701 1 007	Staf /Agendaris,Pengumpul dan pengelola laporan	SLTA
10	MUSTAMIM HIDAYAT NIP.198011122009011005	Staf /Agendaris,Pengumpul dan pengelola laporan	SLTA
11	AMBARWATI NIP. 19870227 201101 2 012	Staf /Agendaris,Pengumpul dan pengelola laporan	SLTA
12	SIGIT ANGGARA MULYA NIP. 19760525 201001 1 005	Staf /Agendaris,Pengumpul dan pengelola laporan	SLTA
13	SUWANTO NIP. 19691205 200906 1 001	Staf /Agendaris,Pengumpul dan pengelola laporan	SLTA

14	MUH. SYAIFUDDIN 198212162010011003	Staf /Agendaris,Pengumpul dan pengelola laporan	SLTA
15	TRI HIDAYATI NIP.19840103 201406 2 002	Staf /Agendaris,Pengumpul dan pengelola laporan	SLTA
16	SOLEH PTT	Staf	SLTA
17	IFAN ARDIYANTO	Tenaga Kebersihan	SLTA
18	JUNDAN KUNCORO ADI	Tenaga Kebersihan	SLTA
19	SUYONO	Driver	Paket C

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Seri D No.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 110) dengan struktur organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SKPD KECAMATAN BATUR**



Tugas Pokok dan Fungsi:

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan yang mencakup Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat serta melaksanakan koordinasi terhadap Unit Perangkat Daerah yang ada di wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Camat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan ;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Penduduk Kecamatan Batur berjumlah 41.863 jiwa yang tersebar di 8 (Delapan) Desa merupakan potensi SDM dan Tersedianya lahan tanah kering yang cukup luas, dapat mendukung kemajuan pembangunan di wilayah Kecamatan Batur.

Mata pencaharaan sebagian Penduduk Kecamatan Batur adalah dari sektor pertanian jenis hortikultura, baik milik sendiri, menyewa, maupun sebagai buruh.

Selain jumlah penduduk, yang bisa menjadi potensi untuk mendukung kemajuan Kecamatan Batur adalah komoditi pertanian antara lain :

Sektor Pertanian :

- Kentang, Kacang merah, Kacang Pul/Dieng ,
- Kobis, Wortel, Sledri, Bawang Daun, lombok
- Karika
- Tamarillo
- Jagung.

Sektor Peternakan :

- Domba
- Sapi
- Kambing

Industri kecil

- Keripik kentang, keripik tales,

- Sirup carika, terong belanda
- Jenang kacang, carica, dll

Sedangkan sarana dan prasarana umum yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan antara lain :

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Desa
2. Sarana Jalan dan Jembatan
3. Sarana perekonomian (Pasar, Toko, Kios, Warung dll)
4. Jasa / Perhubungan (Jaringan Telpun, jaringan internet)
5. Sarana Pendidikan
6. Sarana Kesehatan (Puskesmas)
7. Obyek Wisata
8. Sarana Perbankan.

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

1. Sarana dan prasarana untuk pelayanan publik masih kurang.
2. Dokumen perencanaan masih kurang baik (belum SMART).

Solusi yang diharapkan :

1. Perlunya penambahan anggaran ke BPPKAD.
2. Perlu bintek peningkatan kapasitas SAKIP.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

VISI DAN MISI

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan RENSTRA Kecamatan Batur Tahun 2023-2026.

Kecamatan Batur menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan.

Visi Kecamatan Batur adalah RPD 2023-2026 memperhatikan RPJPD 2005-2025 yaitu:

“BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN”

Misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Batur adalah Misi Kedua dan Keempat yaitu :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif , efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

TUJUAN.

Tujuan Kecamatan Batur dalam 1 (satu) Tahun sampai dengan 5

(lima) Tahun adalah antara lain:

1. Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN
2. Meningkatnya jumlah PAD
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa
4. Meningkatkan tertib administrasi desa
5. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel
6. Meningkatnya nilai survey kepuasan Masyarakat

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai Kantor Kecamatan Batur dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari jadwal waktu yang sudah ditentukan. Dalam sasaran tersebut meliputi uraian sasaran dan indikator sasaran, uraian sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Batur adalah:

- 1. Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik Untuk Urusan Kewilayahan**
- 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Urusan Kewilayahan**

KEBIJAKAN.

Kebijakan sebagai Pedoman, pegangan dan petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran, tujuan, serta visi dan misi Instansi Pemerintah, mendasari hal tersebut maka kebijakan yang ditetapkan Kantor Kecamatan Batur adalah:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
4. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
6. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
7. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

PROGRAM.

Program adalah kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun program kecamatan Batur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki adalah :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pejanjian Kinerja Kantor Kecamatan Batur Tahun 2023 memuat informasi semua program/kegiatan dalam mencapai sasaran sesuai dengan program yang ingin dicapai dalam tahun tersebut, Program / Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Batur tidak lepas dari VISI dan MISI yang ada.

Anggaran yang tertuang pada DPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp **2.238.309.563,00**

terdiri dari 4 (empat) program yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan 20 (dua puluh) sub kegiatan.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Batur telah melaksanakan 4 (empat) program yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan 20 (dua puluh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah :
 1. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - 1.1. Penyedia gaji dan tunjangan ASN
 - 1.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 2. Administrasi umum perangkat daerah
 - 2.1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 2.2 Penyedia bahan logistik kantor
 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - 3.1. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3.2. Penyedia jasa pelayanan umum kantor
 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 4.1 Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 4.2 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 4.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
2. Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik:
 1. Pelaksaaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
 - 1.1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
 - 1.2. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum :
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - 1.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
4. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 1. Fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
 - 1.1. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 - 1.2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 1.3. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 1.4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 1.5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum
 - 1.6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1.7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas sumber daya yang digunakannya.

Adapun rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Batur Tahun 2013-2026 setidaknya ada 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini yaitu :

Sasaran 1 :	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik Untuk Urusan Kewilayahan
--------------------	--

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 1 dimaksud, maka dilakukan pengukuran melalui 1 (tiga) Indikator kinerja, adapun realisasi kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
- Nilai survey kepuasan masyarakat	81,125	83,71	%
Rata-rata capaian			103,10%

Realisasi kinerja pada sasaran 1 yang telah ditargetkan dalam Tahun 2023 telah tercapai dengan rata-rata capaian **103,10%**.

Tahun 2022 nilai IKM **81,125** , jika dibanding tahun ini terjadi peningkatan nilai rata-rata.

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kinerja Unsur Pelayanan
1	Prosedur Pelayanan	3,16	Baik
2	Kepastian Persyaratan Pelayanan	3,08	Baik
3	Kesamaan Persyaratan Pelayanan	3,12	Baik
4	Kecepatan pelayanan	4	Baik
5	Kesopanan dan keramahan	3,2	Baik
6	Keamanan pelayanan	3,26	Baik
7	Ketepatan pelaksanaan waktu pelayanan	3,2	Baik
8	Kenyamanan Pelayanan	3,08	Baik
9	Kewajaran biaya pelayanan	3,56	Baik
	Nilai IKM	81,125	Baik

Dari hasil survey terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan tersebut rata-rata mempunyai nilai Baik. Namun demikian unsur Waktu Pelayanan memiliki nilai terendah yakni 3,06. Hal ini disebabkan antara lain : untuk pelayanan KTP, KK sangat tergantung dari Koneksi Jaringan Internet. Selama ini jaringan internet SIAK dikecamatan sering trouble dan lamban. Penyebab lain terkadang juga dari pemohon sendiri, yakni dokumen pendukung permohonan KK,KTP, Surat Pindah, Akte dan Dispensasai Nikah belum lengkap / tidak sinkron antara dokumen yang satu dengan yang lain

Untuk capaian kinerja pada sasaran 1 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada perencanaan strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	Realisasi	
		2022	2023
Nilai survey kepuasan masyarakat	81,125	81,125	83,71

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sudah tercapai **103,10%**.

Keberhasilan capaian kinerja didukung antara lain :

1. Peningkatan mutu pelayanan oleh Aparatur Kecamatan
2. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Aparatur Kecamatan dengan pihak terkait (Forkopinca, UPT, Pemerintah Desa, dan Masyarakat pada umumnya)

Untuk melaksanakan sasaran 1 terdapat anggaran Rp.2.194.126.663,- dengan realisasi Rp.2.145.837.872,- atau 97,80 % jika dibandingkan dengan realisasi kinerja 103,10 % dan realisasi anggaran 97,80 % maka efisien.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 1 (satu) adalah respon pihak terkait dalam mengisi kuisioner SKM yang lambat, sarana dan prasarana yang masih kurang seperti : kursi roda, tv pelayanan, menyebabkan rekapitulasi nilai IKM juga lambat.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk pencapaian target selanjutnya adalah dengan menyebarkan kuisioner disamping kepada masyarakat yang datang juga dititipkan melalui perangkat desa, Pengajuan anggaran ke BPPKAD.

Sasaran 2 :	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Urusan Kewilayahan
--------------------	---

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 2 dimaksud, maka dilakukan pengukuran melalui 1(satu) indikator kinerja. Adapun realisasi indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	%
Nilai SAKIP	CC 54,00	B 65,80	121,85 %

Indikator sasaran strategis 2 dapat tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 121,85%. Berdasarkan LHE nilai SAKIP Kecamatan Batur **65,80** dengan kategori **B** atau **BAIK** dengan interpretasi Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kecamatan Batur.

Perbandingan nilai sakip

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	Realisasi	
		2022	2023
Nilai SAKIP	CC (54,00)	CC	B (65,80)

Untuk melaksanakan sasaran 2 terdapat anggaran Rp.44.182.900,- dengan realisasi Rp.42.726.100,- atau 96,70 % jika dibandingkan dengan realisasi kinerja 121,85 % dan realisasi anggaran 96,70 % maka efisien.

Untuk meningkatkan nilai SAKIP maka perlu perbaikan, antara lain :

3. Aspek perencanaan

- Dokumen perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik
- Perencanaan kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

4. Aspek Pengukuran Kinerja

- Pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien
- Belum dilakukan review secara berjenjang dan berkelanjutan
- Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyusunan strategi pencapaian kinerja yang efektif dan efisien

3. Aspek Pelaporan Kinerja

- Laporan kinerja belum dipublikasi pada website OPD
- Laporan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja informasi perbaikan/penyempurnaan kinerja
- Pelaporan kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian kinerja berikutnya

4. Aspek Evaluasi Kinerja Internal

- Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan pada semua jenjang secara memadai

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Batur , pada Tahun Anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp **2.238.309.563,00**

, - yang bersumber dari APBD. Komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.855.592.039,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 379.026.524,- Belanja Modal sebesar Rp. 3.691.000,- dengan rincian sebagai berikut

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.855.592.039,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 379.026.524,-
3. Belanja Modal Rp. 3.691.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER. 31 DESEMBER 2023
KECAMATAN BATUR

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.254.700	4.079.700	95,89
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0

				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	0	0
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.795.800	6.590.000	96,97
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.806.600	6.731.600	98,90
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.305.800	4.030.800	93,61

				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.870.000	9.324.000	94,47
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai pelaksanaan tugas kepala daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.150.000	11.970.000	98,52
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	10.952.600	9.830.400	89,75
				Penyediaan bahan logistik kantor	118.283.900	109.709.983	90,45
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	1.782.812.039	1.768.246.699	99,18
				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	51.660.000	45.270.000	87,63

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	605.000	605.000	100
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.000.000	13.580.048	61,73
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	95.430.824	92.021.342	96,43
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.076.400	13.912.500	86,54
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.400.000	19.400.000	100

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.100.000	7.100.000	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.691.000	3.600.000	97,53
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	400.000	400.000	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
3	Meningkatnya jumlah PAD	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	7.831.200	7.826.200	99,94

			dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	57.883.700	57.055.700	98,57
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	0	0
JUMLAH					2.238.309.563	2.188.563.972	97,78

Dilihat dari realisasi anggaran, untuk Belanja Operasional penyerapan anggaran Tahun 2023 mencapai **97,78 %**, atau anggaran sebesar Rp. **2.238.309.563,-** realisasi sebesar Rp.

2.188.563.972.-

Dari 20 subkegiatan yang dikelola Kecamatan Batur rata – rata realisasi anggarannya mencapai **97,78%**, Karena terdapat kelebihan anggaran yang cukup signifikan di Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik akibat dari tidak adanya harga satuan Rp. 1.500.000,- per bulan di SIPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD karena terjadinya reconfusing anggaran.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Batur merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dan merupakan bentuk perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun secara sistematis yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dalam penggunaan dana.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batur, dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendukung pelaksanaan tugas serta pencapaian hasil kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada Akuntabilitas Kinerja yang didalamnya memuat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dapat mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja dari dua (2) sasaran adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik Untuk Urusan Kewilayahan	103,10%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Urusan Kewilayahan	121,85 %
	Rata-rata capaian	112,475 %

Dengan memperhatikan data tersebut di atas, maka dapat diketahui capaian kinerja Kecamatan Batur Tahun 2023 tercapai dengan kategori **Baik** dengan rata rata capaian sebesar 112,475%.

●Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Batur di masa mendatang antara lain :

1. Perlu perbaikan perencanaan agar program dan kegiatan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikut sertakan pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar nilai SKM meningkat.
4. Mengadakan monitoring dan evaluasi secara intens ke Desa kaitannya dengan Pelunasan PBB tepat waktu, Pembinaan Administrasi Desa, Monitoring DD/ADD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Batur Tahun 2023 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

CAMAT BATUR,
AJI PILUROSO, S.STP
Perabina Tk I
NIP. 19820415 200112 1 003